

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA KECIL MENENGAH
(UKM) PADA RUMAH MAKAN PALUPI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RIZKI KURNIAWAN
1013010062/FEB/EA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2014**

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA KECIL MENENGAH
(UKM) PADA RUMAH MAKAN PALUPI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi Akuntansi**



Diajukan Oleh :

RIZKI KURNIAWAN
1013010062/FEB/EA

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2014**

SKRIPSI
ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PADA
RUMAH MAKAN PALUPI

Disusun oleh :

Rizki Kurniawan
1013010062/FEB/EA

Telah dipertahankan Dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Progdi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 17 april 2014

Pembimbing :
Pembimbing Utama

Tim Penguji :
Ketua

Dr. Indrawati Yuhertiana, MM, Ak, CA

Dr. Indrawati Yuhertiana, MM, Ak, CA

Sekretaris

Drs. Ec. Muslimin, Msi

Anggota

Drs, Ec. Bagus Ramelan S, MSc, Ak

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa timur

Dr. H . Dhani Ichsanuddin Nur, MM
NIP. 19630924 198903 1001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr, Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat, karunia dan kasih sayangNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya.

Skripsi ini mengambil judul **“ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PADA RUMAH MAKAN PALUPI”**. Penulisan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Teguh Soedarto, MP selaku Rektorat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya.
2. Bapak Dr. H. Dhani Ichsanudin Nur, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya.
3. Bapak Drs. Ec. H. RA. Suwaidi, MS selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya.

4. Ibu Dr. Indrawati Yuhertiana, MM, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima Kasih atas bimbingannya selama ini, karena bimbingan Ibu saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Ec. Muslimin.Msi dan Bapak Drs.Ec. Bagus Ramelan S, M.Sc,Ak selaku Dosen Penguji Lisan. Terima Kasih atas bimbingannya selama ini dan telah mengantarkan penulis lulus Sarjana Ekonomi.
6. Keluarga tercintaku, Ayah dan Ibu yang selalu mendoakanku, mendukungku dan menasihati selama ini hingga menjadi sarjana. Buat adik – adik ku (Reza dan Karina) terima kasih semua doanya.
7. Pemilik Rumah Makan Palupi yang telah membantu dan memberikan informasi dalam menyusun skripsi.
8. Pegawai UPTD Pelayanan Pajak Wilayah Surabaya 8 yang telah membantu dan memberikan informasi dalam menyusun skripsi.
9. Teman - teman tercinta Ratih Febriyanti, Rizki Kacang, Helmi, Budiman, Putu, Jamal, Bram, Acil, Dimas, Yogi, Sueb, Agung, Ratna, Ovi, Tety pokoknya semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih banyak yang sudah banyak membantu dalam penelitian skripsi.
10. Anak - anak MOCESI (Motor CEper modifikaSI Surabaya) dan seluruh Ceperis Indonesia terima kasih dukungannya.
11. Seluruh teman - teman Jurusan Akuntansi 2010 khususnya teman - teman bimbingan Ibu Indrawati yaitu Nadia, Nova, Okta, Septian, Sari dan teman-

teman kuliah sore yang selalu memberi semangat dan doa serta kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih jauh dari sempurna di dalam penulisan skripsi ini, oleh karena nya penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran bagi perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, 08 Maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKS	vi
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori.....	10
2.2.1 Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM)	10
2.2.2 Pengertian Pajak.....	11
2.2.2.1 Pengertian Pajak Pusat.....	13
2.2.2.1.1 Pajak UMKM	14
2.2.2.1.2 Pajak Penghasilan.....	19
2.2.2.2 Pengertian Pajak Daerah.....	34
2.2.2.2.1 Peraturan Daerah no. 4 tahun 2011.....	36
2.2.4 Teori Kepatuhan Wajib Pajak.....	40
2.3 Kerangka Pemikiran.....	44

BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Penentuan Informan	47
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.4 Teknis Analisis Data.....	48
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 57
4.1 Deskripsi objek penelitian	57
4.1.1 Sejarah Singkat Rumah Makan Palupi.....	57
4.1.2 Motto	59
4.1.3 Pegawai Rumah Makan Palupi (Rungkut Asri Tengah).....	60
4.2 Kepatuhan Wajib Pajak	60
4.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Makan Palupi	60
4.2.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	66
4.3 Pembahasan	70
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79
5.3 Keterbatasan Penelitian	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Laporan penyetoran Pajak Restoran	
Rumah Makan Palupi tahun 2013	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tampak depan Rumah Makan Palupi	57
Gambar 2 Bagian dalam Rumah Makan Palupi	58
Gambar 3 Produk Rumah Makan Palupi	59

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PADA RUMAH MAKAN PALUPI.

Oleh :

Rizki Kurniawan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kepatuhan wajib pajak pada Rumah Makan Palupi, sebuah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang berlokasi di Rungkut Asri Tengah No. 10 Kota Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologi. Informan ditentukan dengan teknik *snow ball sampling*, yaitu Penggalan data melalui wawancara mendalam dari satu responden ke responden lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi, jenuh. Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu: reduksi data, data display, dan kesimpulan/verifikasi. Fokus yang diteliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak pada Rumah Makan Palupi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai kepatuhan wajib pajak pada Rumah Makan Palupi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemilik Rumah Makan Palupi sudah memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak dalam hal pembayaran Pajak Restoran sebesar 10% (Perda No. 4 tahun 2011). Akan tetapi, Pemilik Rumah Makan Palupi tidak memenuhi kewajibannya dari segi Pajak Penghasilan (PPh 21) dan Pajak Penghasilan UMKM (PP No.46 tahun 2013 sebesar 1%) dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dirjen Pajak mengenai pajak penghasilan (PPh 21) dan pajak penghasilan UMKM (PP No.46 tahun 2013 sebesar 1%).

Keyword : UKM, Pajak, Kepatuhan, Wajib Pajak.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Kecil Menengah (UKM) di Negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam Negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya - upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

Karakteristik Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, *the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic* (CEMSED) dan *the Center for Economic and Social Studies* (CESS) pada tahun 2000 adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi.

Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.

Mengenai pengenaan pajak, mempunyai dua fungsi yaitu sebagai sumber keuangan Negara atau budgetair, alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (*Regularent*). Peranan pajak dirasakan semakin penting sehingga setiap tahun target penerimaan pajak semakin ditingkatkan. Sedang bagi sektor publik pajak dipandang sebagai beban.

Tekad Pemerintah dalam membudayakan pajak untuk mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi sadar pajak rupanya sudah bulat. Hal ini dilaksanakan dalam rangka melanjutkan pembangunan nasional menuju kemandirian Bangsa. Ujung tombak dari kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terletak pada kantor penyuluhan dan pengamatan potensi pajak, karena penyuluhan pada hakekatnya memegang peranan penting. Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang pajak, maka wajib pajak tidak akan merespon adanya kebutuhan dan pembangunan yang berasal dari ketentuan peraturan perpajakan. Usaha meningkatkan penerimaan Negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya.

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan adalah melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Melalui reformasi perpajakan diharapkan akan mampu meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan.

Sebelum diadakannya reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan yang diterapkan di Indonesia adalah *official assessment*, namun setelah reformasi perpajakan sistem pemungutan pajak berubah menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sedangkan *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2009:7). Dengan penerapan *self assessment system*, Pemerintah mengharapkan agar mampu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Salah satu tolak ukur untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhannya melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, tingkat pengembalian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak badan di Surabaya relatif rendah dari 53.714 wajib pajak per Desember 2009 baru tercatat 24.038 yang telah menenuhi ketentuan (Bisnis.com, 23 Februari 2010).

Pemerintah memiliki kriteria tentang wajib pajak patuh. Dasar hukum penetapan kriteria wajib pajak patuh ini adalah Undang - Undang No. 28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kriteria ini ditetapkan dengan tujuan untuk memotivasi para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta meningkatkan jumlah wajib pajak patuh.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati wajib pajak.

Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak juga menjadi peranan penting terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. “Petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran tentang tanggung jawab membayar pajak” (Gardian & Haryanto, 2006; 19). Pelayanan yang baik yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriati dan Nur Hidayati (2008) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak dan persepsi kriteria wajib pajak patuh tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Meinarni Asnawi, Zaki Baridwan, Supriyadi, dan Ertambang (2009) menunjukkan bahwa pemahaman etika pajak memiliki pengaruh yang dominan dalam peningkatan keputusan kepatuhan pajak dibandingkan faktor ekonomi (strategi audit random dan *perceived probability of audit*). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dapat memberikan 4 K yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan (Nih Luh Supadmi 2009: 13).

Pada saat ini Usaha Kecil Menengah (UKM) sudah dikenakan pajak. Ada Pajak Pusat dan ada Pajak Daerah, diantaranya Pajak Pusat adalah Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP Nomor 46 tahun 2013) itu lebih dikenal PPh atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) besarnya pajak 1% dan Pajak Penghasilan (PPh pasal 21). Pajak Daerah yaitu Pajak Restoran yang tercantum pada Peraturan daerah (Perda) No .4 tahun 2011 besar pajak nya 10%.

Pada Rumah Makan Palupi yang berada di Surabaya (Rungkut Asri Tengah) termasuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sudah dikenakan Pajak Restoran (10%), namun pada kenyataan yang terjadi pemilik Rumah Makan

Palupi tidak setuju dengan dikenakan Pajak Restoran (10%) tersebut dikarenakan tidak semua rumah makan di daerah Rungkut dikenakan Pajak Restoran (10%).

Maka, berdasarkan uraian diatas tertarik untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu mengambil judul : **ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PADA RUMAH MAKAN PALUPI.**

1.2. Rumusan masalah

Permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana kepatuhan pemilik Rumah Makan Palupi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui kepatuhan pemilik Rumah Makan Palupi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

2. Bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Pelayanan Pajak Wilayah Surabaya 8)

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam hal meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

3. Bagi Peneliti lain dan diri sendiri

Melatih untuk menerapkan ilmu yang didapat dari bangku kuliah dan untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan.